

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap berdirinya Negara harus mempunyai suatu tujuan, tujuan dari setiap Negara juga tentunya memiliki perbedaan dari satu Negara dengan Negara yang lain. Karena diselaraskan dengan pandangan dan landasan hidup masyarakat yang berasal dari nilai-nilai luhur Negara tersebut. Begitu pula dengan beberapa faktor ini yang bisa mempengaruhi perbedaan tujuan dari setiap Negara seperti lokasi, latar belakang sejarah pembangunan, dan dampak spesialis yang terkait.

Secara umum tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Tujuan negara juga pada dasarnya merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengatur kehidupan rakyatnya. Maka dengan adanya tujuan negara dirasa sangat penting untuk keberlangsungan dalam kehidupan bernegara agar segala sesuatunya terstruktur dan berlangsung sebanding melalui prinsip yang akan diraih (N. M. Sari, 2019).

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengenai penjelasan tentang upaya mensejahterakan seluruh warga Negara Indonesia maka akibatnya Pemerintah Indonesia berkewajiban dan berkomitmen untuk memastikan dan menumbuhkan upaya peningkatan dan penyelenggaraan kesejahteraan (*well-being*) bagi setiap warga negaranya (BPS, 2017).

Sejalan dengan adanya dasar tersebut Pemerintah Indonesia menyadari bahwa diperlukan beberapa upaya dalam mencapai tujuan tersebut termasuk dengan melakukan pembangunan ekonomi. Beberapa kegiatan pembangunan

ekonomi sendiri sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Diantaranya dengan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan yang ditujukan pada wilayah yang sebagian besar penduduknya berada di tingkat kesejahteraan yang rendah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah diselenggarakan dengan cara terorganisasi dan berkelanjutan sepadan dengan keperluan dari masing-masing wilayahnya, berbeda wilayah juga pasti memiliki kebutuhan yang berbeda karena setiap daerah memiliki tingkat permasalahan masing-masing

Menurut Reynell dalam Rosiana dan Suryani (2012), pembangunan di bidang ekonomi adalah kunci dalam menentukan tingkat kemiskinan karena terdapat siklus yang jelas antara siklus bisnis dengan pertumbuhan kemiskinan. Apabila sebuah negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat maka akan memperbanyak kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga kemiskinan menurun. Todaro dalam (Riani, 2006) Sedangkan pembangunan pada bidang non ekonomi dapat berupa pembangunan manusia yang bertujuan agar tercipta penduduk yang memiliki pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Dengan pembangunan tersebut akan berdampak positif terhadap penduduk di Indonesia yaitu tercapainya kemakmuran.

Salah satu faktor dari penghambatnya pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah permasalahan kemiskinan, Oleh sebab itu efektivitas dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin merupakan pemikiran mendasar dalam memilih suatu prosedur atau instrumen pembangunan Hal ini mengimplikasikan bahwa salah satu langkah utama dalam memilih kawasan

sektor andalan atau sektor titik berat pembangunan nasional adalah kecukupan dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin (Simatupang, 2003).

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling rendah, yaitu kebutuhan pangan maupun non pangan dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau besaran rupiah untuk pemanfaatan individu setiap bulannya (BPS, 2018).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang sifatnya global dimana setiap Negara pasti menghadapi permasalahan tersebut dan tidak bisa terbebas dari kemiskinan. Setiap negara pasti mendapati ketidakseimbangan antara golongan yang kaya dan yang miskin. Dimana pada golongan kaya identik selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan pada golongan yang miskin menjalani hidupnya dengan keterbatasan finansial yang membuatnya semakin terpuruk (Listiani, 2018).

Bicara mengenai kemiskinan, sudah bukan situasi yang asing bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bisa dilihat pada tabel selama lima tahun berturut turut kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 menjadi 25,14 juta jiwa dengan persentase 9,41%. Penyebab turunnya angka kemiskinan ini karena upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dalam empat tahun terakhir, dengan cara menaikkan harga barang dan jasa secara umum dan ditekan pada kisaran 3% per tahunnya.

Tabel 1.1

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2019

Pulau	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
Sumatera	8,28	11,37	10,03	2.096,64	3.754,65	5851,29
Jawa	6,46	12,25	8,44	6.400,92	6.322,20	12.723,12
Bali dan Nusa Tenggara	8,89	17,88	13,81	596,75	1.449,38	2.046,13
Kalimantan	4,25	7,46	5,93	331,26	642,93	974,19
Sulawesi	5,61	13,37	10,23	444,69	1.565,16	2.009,85
Maluku dan Papua	4,97	29,12	20,91	1245,54	1.415,60	1.540,14
Indonesia	6,69	12,85	9,41	9.994,80	15.149,92	25.144,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Terlihat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia tertinggi terdapat di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu 20,91%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah terdapat di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 5,93%. Untuk jumlah penduduk miskin yang terendah terdapat di Pulau Kalimantan yaitu 0,97 juta orang (BPS, 2019). Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin yang tertinggi sebagian besar masih berada di Pulau Jawa yaitu 12,72 juta orang. Meski di pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi secara persentase, tetapi di pulau Jawa masih bukan yang tertinggi. Karena mengingat di pulau Jawa adalah pulau dimana yang memiliki kepadatan penduduk terbesar.

Sehingga rata rata persentase dengan jumlah penduduknya tidak sebesar di pulau Maluku dan Papua.

Di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur sendiri masih menjadi permasalahan mengenai kemiskinan. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa , Indonesia dengan ibu kotanya di Surabaya . Jawa Timur memiliki wilayah terbesar di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki penduduk terpadat kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan juga sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi untuk penduduk Indonesia bagian timur. Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu penopang kekuatan perekonomian di Indonesia. Karena aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur berkontribusi sekitar 15% produk domestik bruto nasional, kedua setelah DKI Jakarta (Purwanto, 2020). Meski begitu Provinsi Jawa Timur masih di dapati permasalahan kemiskinan.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa
Per September 2017-2019

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
DKI Jakarta	393,13	372,26	362,30	3,87	3,55	3,42
Jawa Barat	3.774,41	3.539,40	3.375,89	7,83	7,25	6,82
Jawa Tengah	4.197,49	3.867,42	3.679,40	12,23	11,19	10,58
DI Yogyakarta	466,33	450,25	440,89	12,36	11,81	11,44

Jawa Timur	4.405,27	4.292,15	4.056,00	11,20	10,85	10,20
Banten	699,83	668,74	641,42	5,59	5,24	4,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2019.

Dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di pulau jawa yang jumlahnya tertinggi yaitu pada Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin yang tertinggi berada di provinsi DI Yogyakarta. Periode september pada tahun 2017-2019 Provinsi Jawa Timur mendominasi jumlah penduduk miskin yang ada di pulau jawa. Menurut Badan Pusat Statistik Periode september 2017-2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menurun tiap tahunnya dimana pada tahun 2019 sebesar 4.056,00 ribu jiwa dengan persentase sebesar 10,20% lebih kecil daripada tahun tahun sebelumnya (BPS, 2019).

Provinsi jawa timur sendiri memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang terdapat di pulau jawa. Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua setelah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar (Purwanto, 2020). Kuantitas atau jumlah penduduk bisa dimanfaatkan sebagai potensi ataupun dapat menjadi timbulnya permasalahan bagi suatu wilayah, menjadi potensi jika jumlah penduduk memiliki keseimbangan dengan sumber daya yang lain dan kualitas hidup yang baik. Begitu pula sebaliknya, dapat menimbulkan masalah jika jumlah penduduk melebihi kapasitas di wilayah tersebut (Christiani, n.d.).

Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi mutu hidup masyarakat, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai permasalahan mengenai masalah penduduk seperti masalah kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Secara umum penduduk yang memiliki kepadatan cukup tinggi akan berdampak pada lingkungannya sesuai dengan maraknya isu-isu perihal pembangunan permukiman, meningkatnya kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, pangan, dan pelayanan kesehatan serta menurunnya kualitas itu sendiri (Triyastuti, 2019).

Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan memberikan komitmen yang cukup besar untuk penghitungan Output Nasional Total Publik (Produk Domestik Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim 2019 menyumbang 14,29 persen PDB Nasional (Purwanto, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 5,52% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tersebut di dorong oleh sisi produksi dengan pertumbuhan tertinggi adalah terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum disusul dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (BPS, 2019).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 cukup baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 5,50%, dan pada tahun 2017 sebesar 5,46%. Karena Jawa Timur merupakan Provinsi penyumbang PDRB yang cukup besar maka laju pertumbuhan ekonomi harus terus di dorong dan di tingkatkan lagi, apalagi yang menjadi penyokong penyumbang PDRB

sebagian besar adalah di Provinsi Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019).

Dalam mengatasi kemiskinan terdapat salah satu cara yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dalam Bintang dan Woyanti (2018), Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sepanjang kegiatan perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Hal ini diidentikkan dengan kemiskinan yaitu berharap bahwa sumber dari pertumbuhan tersebut bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusianya begitu pula dengan tersedianya teknologi yang memadai.

Dengan latar belakang provinsi yang memiliki aktivitas perekonomian cukup tinggi dan pesat tidak banyak juga penduduk dari luar Provinsi Jawa Timur memilih Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk menempuh pendidikan. Tetapi yang perlu diperhatikan di Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan begitu dalam hal penyerapan tenaga kerjanya juga masih belum maksimal. Adanya aktivitas bermigrasi atau yang biasa diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan tertentu tersebut jika tidak diikuti dengan bekal riwayat pendidikan yang telah di tempuh untuk *skill* dan kemampuan yang bagus maka bermigrasi hanya akan menambah angka pengangguran yang nantinya akan mencetak angka kemiskinan baru (Kominfo, 2010).

Dengan adanya kegiatan pembangunan nasional merupakan salah satu upaya dalam membuka pintu investasi bagi para investor (Lubis dalam Ratih et al., 2017). Maka dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap kegiatan yang lainnya. Setelah terjadi peningkatan produksi yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Hugan & Gao, 2012). Investasi mempunyai fungsi yang mendasar dalam menggerakkan kehidupan perekonomian suatu negara, karena dengan adanya pembentukan modal juga akan menciptakan lapangan kerja yang baru kemudian akan berpengaruh terhadap peluang luasnya kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran (Prasetyawan et al., 2017).

Data pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 9,8% mengalami kontraksi sampai pada angka -23,0% pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 14,16%. Pertumbuhan investasi tersebut didorong baik PMA maupun PMDN yang saling memberikan kontribusi secara signifikan. Dengan capaian tersebut Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga setelah Jawa Barat (Zahro, 2021). Salah satu alasan dari keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan daya tariknya terhadap investasi yaitu tergantung dari kemampuan daerahnya dalam merumuskan kebijakan yang erat kaitannya dengan investasi kemudian usaha dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Boediono dalam Purnomo & Sri Kusreni, 2018).

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan adalah

investasi jangka panjang, hal ini menempatkan bahwasannya dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dari individu-individu dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dalam jangka waktu tertentu, melalui dari jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki kemudian latar belakang pendidikan yang telah dijalani (Suhardan dalam Saitian, 2014).

Data pendidikan di Provinsi Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik berdasarkan rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah sebesar 7,34% kemudian pada tahun 2018 sebesar 7,39% dan meningkat menjadi 7,59% (BPS, 2019). Peningkatan tersebut tidak lepas dari dampak adanya program Tis Tas atau yang dikenal dengan program pendidikan gratis berkualitas (Teddy Ardianto, 2019).

Menurut Sanz dalam Bintang & Woyanti (2018), berpendapat bahwa pendidikan kemungkinan besar akan mempengaruhi kemiskinan. Karena dengan didapatinya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menjadi penyebab dari terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Begitu pula menurut (Ele-Ojo Ataguba, J., Eme Ichoku, H. & Fonta, 2013), salah satu faktor penentu penurunan tingkat kemiskinan adalah faktor pendidikan.

Tidak hanya pendidikan, kesehatan juga merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat. Menurut (Suryawati, 2005), masalah kesehatan adalah masalah yang rawan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini

dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka dalam upaya mempersehat diri dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009), juga menjelaskan bahwa kesehatan berhak dimiliki oleh setiap orang. Dengan ini maka Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya. Menurut (Eviana Anggraini & Lisyaningsih, 2010), Angka Harapan Hidup yang rendah dalam suatu wilayah memperlihatkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan belum berhasil, dan sebaliknya semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka semakin memperlihatkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 70,68% dan mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir menjadi 71,18% pada tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program kesehatan dan program sosial ekonomi yang dapat dicapai dengan baik yang umumnya dapat ditunjukkan dari adanya peningkatan angka harapan hidup penduduk dalam suatu daerah (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019).

Kesehatan bukan hanya sebagai aspek penting yang bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan setiap individu maupun masyarakat di suatu daerah. Akan tetapi kesehatan juga sebagai modal penting bagi individu dan masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk menggerakkan semua lini kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, “

Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ” yang artinya apabila tubuh sehat dan jiwa kuat maka banyak hal baik juga yang bisa dilakukan. Hal tersebut dijadikan dasar negara-negara di dunia untuk terus meningkatkan derajat kesehatan. Maka dari itu kesehatan juga menjadi faktor penting bagi pencapaian pembangunan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan yang ingin di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 pada Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kemiskinan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi Pemerintahan khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dan juga sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang untuk mengatasi masalah kemiskinan.